



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PADA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

SURABAYA



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

TAHUN 2019



LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Surabaya

Pada 29 Januari 2020



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan di jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Adapun kegiatan yang mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada masyarakat adalah dengan mengadakan Survei Indeks Persepsi Korupsi untuk membangun Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Outcome dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM di satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya khususnya dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada umumnya. Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan dan perubahan peraturan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM, yang mengarah kepada terwujudnya **zero tolerance approach** (pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan korupsi. Perjalanan untuk mencapai Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan badan peradilan yang agung khususnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membutuhkan integritas, kerja keras, komitmen, keyakinan dan kerjasama.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	1
1.4 Rencana Kerja.....	2

BAB II METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian	3
2.2 Populasi dan Sampel.....	3
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	3
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	3
2.5 Teknik Analisa Data.....	3
2.6 Tahapan Pelaksanaan.....	4

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden	6
3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	8
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	15
3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan	16

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	18
4.2 Rekomendasi.....	18

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1 Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zonal Integritas	4
2.2 Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	5
2.3 Nilai Indeks Persepsi Korupsi	5
3.1 Jenis Kelamin Responden	6
3.2 Tingkat Pendidikan Responden	6
3.3 Jenis Pekerjaan Responden	7
3.4 Kelompok Usia Responden	8
3.5 Indeks Indikator Manipulasi Peraturan	8
3.6 Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan	9
3.7 Indeks Indikator Menjual Pengaruh	10
3.8 Indeks Indikator Transaksi Biaya	10
3.9 Indeks Indikator Biaya Tambahan	11
3.10 Indeks Indikator Hadiah	12
3.11 Indeks Indikator Transparansi Biaya	12
3.12 Indeks Indikator Percaloan	13
3.13 Indeks Indikator Perbuatan Curang	14
3.14 Indeks Indikator Transaksi Rahasia	14
4 Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	15
5 Persepsi Indeks Korupsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	15

**DAFTAR GRAFIK**

<i>Grafik</i>	<i>Halaman</i>
3.1 JenisKelamin Responden	6
3.2 TingkatPendidikan Responden	7
3.3 JenisPekerjaan Responden	7
3.4 KelompokUsia Responden	8
3.5 Indeks IndikatorManipulasiPeraturan	9
3.6 Indeks IndikatorPenyalahgunaan Jabatan	9
3.7 Indeks IndikatorMenjualPengaruh.....	10
3.8 Indeks IndikatorTransaksiBiaya	11
3.9 Indeks IndikatorBiaya Tambahan.....	11
3.10 IndeksIndikatorHadiah	12
3.11 Indeks IndokatorTransparansiBiaya.....	13
3.12 IndeksIndikatorPercaloan	13
3.13 Indeks IndikatorPerbuatanCurang	14
3.14 Indeks IndikatorTransaksiRahasia	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.



- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).



BAB II METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik **accidental sampling**. **Accidental sampling** adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu seluruh Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan **tools** untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 2.1
Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas





Tabel 2.2
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2.3
Nilai Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Pelayanan		
			Mutu	Kinerja	
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik	Bersih dari korupsi



BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Jenis Kelamin Responden

Dari sisi jenis kelamin responden, menunjukkan bahwa sebesar **94% (29 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki jenis kelamin sebagai **Laki – Laki** dan **6% (5 orang)** berjenis kelamin **Perempuan**.

Tabel 3.1
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kemin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – Laki	29	94%
2	Perempuan	5	6%
Jumlah :		34	100,00

3.1.2 Tingkat Pendidikan Responden

Dari sisi tingkat pendidikan responden, menunjukkan bahwa sebesar **70% (20 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki pendidikan sebagai **S1**, **5%** dengan Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana dan **SLTA (14 Orang)**.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0,00
2	SD	0	0,00
3	SMP / SLTP	0	0,00
4	SLTA	3	6,0
5	D1/D2/D3/D4	0	0,00
6	S1	20	70,0
7	Pasca Sarjana	11	24,0
8	Tidak mencantumkan pendidikan	0	0,00
Jumlah :		34	100,00

3.1.3 Jenis Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **95,00% (30 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki pekerjaan sebagai **Pegawai Negeri Sipil**.

Tabel 3.3
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	30	95,00
2	TNI / Polri	0	0,00
3	Pegawai Swasta	3	4,00
4	Wiraswasta	0	0,00
5	Petani / Nelayan	0	0,00
6	Pedagang	0	0,00
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,00
8	Lainnya -----	1	1,00
Jumlah :		34	100,00

3.1.4 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **35 tahun s/d 60 tahun**.



Tabel 3.4
Kelompok Usia Responden

No.	Usia / Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	16 - 20	0	0,00
2	21 - 30	0	0,00
3	31 - 40	0	0,00
4	41 - 50	20	93,0
5	51 - 60	14	7,0
6	61 - 70	0	0,00
Jumlah :		34	100,00

3.2 Indeks Persepsi Korupsi perIndikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **4,0**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari tindakan manipulasi peraturan**.

Tabel 3.5.
Indeks Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu Manipulasi Peraturan	1	0	0,00	0,00
2	Sering Manipulasi Peraturan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang Manipulasi Peraturan	3	0	0,00	0,00
4	Tidak ada Manipulasi Peraturan	4	34	100	136
Jumlah :			34	100,00	4,0

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **4,0**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.6
Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu menyalahgunakan jabatan	1	0	0,00	0,00
2	Sering menyalahgunakan jabatan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang menyalahgunakan jabatan	3	0	0,00	0,00
4	Tidak ada penyalahgunaan jabatan	4	34	100	136
Jumlah :			34	100,00	4,0

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **4,0**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.



Tabel 3.7
Indeks Indikator Menjual Pengaruh

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu menjual pengaruh	1	0	0,00	0,00
2	Sering menjual pengaruh	2	0	0,00	0,00
3	Jarang menjual pengaruh	3	0	0,00	0,00
4	Tidak ada penjualan pengaruh	4	34	100	136
Jumlah :			34	100,00	4,0

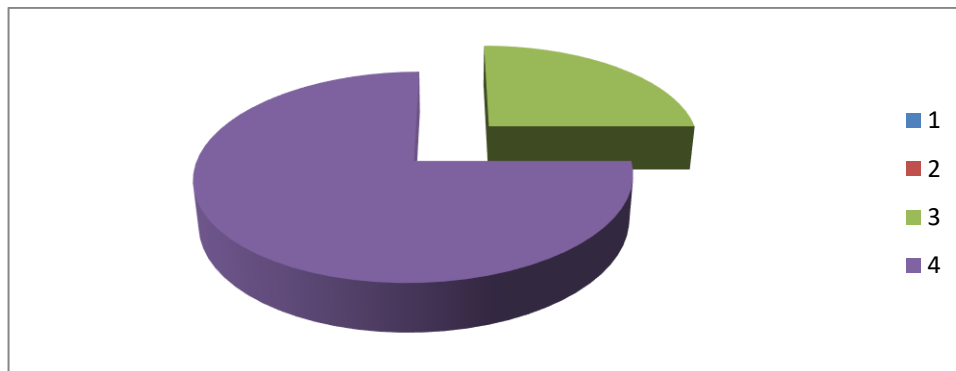
3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,88**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya transaksi biaya**.

Tabel 3.8
Indeks Indikator Transaksi Biaya

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada transaksi biaya	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada transaksi biaya	2	2	20	2
3	Jarang ada transaksi biaya	3	0	0,00	0,00
4	Tidak ada transaksi biaya	4	34	80	132
Jumlah :			32	100,00	3,88



3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,9**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya biaya tambahan**.

Tabel 3.9
Indeks Indikator Biaya Tambahan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada biaya tambahan	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada biaya tambahan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada biaya tambahan	3	1	1,00	1,00
4	Tidak ada biaya tambahan	4	33	99	133
Jumlah :			34	100,00	3,9

3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **4,0**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya pemberian hadiah**.



Tabel 3.10
Indeks Indikator Hadiah

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada hadiah	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada hadiah	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada hadiah	3	0	0,00	0,00
4	Tidak ada hadiah	4	34	100	136
Jumlah :			34	100,00	4,0

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,97**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya transparansi biaya**.

Tabel 3.11
Indeks Indikator Transparansi Biaya

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada tranparansi biaya	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada tranparansi biaya	2	1	1,00	1,00
3	Jarang ada tranparansi biaya	3	0	0,00	0,00
4	Tidak ada tranparansi biaya	4	32	99	135
Jumlah :			34	100,00	3,97

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **4,0**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya percaloan**.

Tabel 3.12
Indeks Indikator Percaloan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada percaloan	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada percaloan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada percaloan	3	0	0,00	0,00
4	Tidak ada percaloan	4	34	100	136
Jumlah :			34	100,00	4,0

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,9**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya perbuatan curang**.



Tabel 3.13
Indeks Indikator Perbuatan Curang

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada perbuatan curang	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada perbuatan curang	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada perbuatan curang	3	1	10,00	1,00
4	Tidak ada perbuatan curang	4	33	90,00	135
Jumlah :			34	100,00	3,90

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **4,0**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **bersih dari adanya transaksi rahasia**.

Tabel 3.14
Indeks Indikator Transaksi Rahasia

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada transaksi rahasia	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada transaksi rahasia	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada transaksi rahasia	3	0	0,00	0,00
4	Tidak ada transaksi rahasia	4	34	100,00	136
Jumlah :			34	100,00	4,0



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh **Indeks Persepsi Korupsi (IPK)** satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar **99,00**.

Tabel 4
Indeks Persepsi Korupsi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya

No	Ruang Lingkup (RL)	NRR per RL	NRR Tertimbang	IPK per RL	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	4	0,4	100	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	4	0,4	100	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	4	0,4	100	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Biaya	3,88	0,39	98	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3,9	0,39	98	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	4	0,4	100	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3,97	0,39	100	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	4	0,4	100	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3,9	0,39	98	Bersih dari korupsi
10	Traksaksi Rahasia	4	0,4	100	Bersih dari korupsi
Jumlah NRR Tertimbang :			3,97		
Indeks Persepsi Korupsi :				99,7	

Indeks **98,7** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **81,26 – 100,00**.



Tabel 5
Persepsi Indeks Korupsi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Pelayanan		
			Mutu	Kinerja	
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Adapun masukan dan pandangan dari responden adalah sebagai berikut :

1. Masukan dan Pandangan Responden01
 - Pelayanan di PTTUN Surabaya agar bisa ditingkatkan lebih baik lagi;
2. Masukan dan Pandangan Responden02
 - Situs web agar selalu di Update agar masyarakat mudah mendapatkan informasi;
3. Masukan dan Pandangan Responden03
 - Agar kedepannya tidak akan ada lagi praktek percaloan di lingkungan peradilan;
4. Masukan dan Pandangan Responden05
 - Sudah baik pelayanannya;
5. Masukan dan Pandangan Responden07
 - Semoga kedepannya sudah tidak ada praktek KKN di Pengadilan dan besar harapan agar putusan Hakim berdasarkan pertimbangan yang matang supaya dapat memberikan rasa keadilan;
6. Masukan dan Pandangan Responden09
 - Petugas seharusnya selalu stanby di tempat sehingga memudahkan proses pelayanan;
7. Masukan dan Pandangan Responden11
 - Pelayanan sudah bagus;
8. Masukan dan Pandangan Responden13
 - Kurang adanya informasi mengenai biaya
9. Masukan dan Pandangan Responden15
 - Harus adanya transparansi biaya;
10. Masukan dan Pandangan Responden18
 - Informasi yang diberikan, terkadang kurang informatif;



11. Masukan dan Pandangan Responden19
 - Kedepannya pelayanan harus semakin baik dan bisa mencegah praktek percaloan /KKN;
12. Masukan dan Pandangan Responden20
 - Kualitas pelayanan ditingkatkan agar tidak ada praktek pungli dalam mengurus perkara;
13. Masukan dan Pandangan Responden21
 - Petugas pelayanannya sangat ramah, semoga makin lama akan semakin lebihbaik;
14. Masukan dan Pandangan Responden22
 - Meskipun sudah tidak sebanyak dulu namun masih ada saja praktek percaloan dan iru manjadi PR bagi aparat penegak hukum untuk memberantasnya;
15. Masukan dan Pandangan Responden24
 - Pelayanan terkadang lama;
16. Masukan dan Pandangan Responden26
 - Untuk menegakkan keadilan seharusnya pengadilan harus bersih dari korupsi /percaloan;
17. Masukan dan Pandangan Responden28
 - Petugas pelayanan terkadang tidak ada ditempat;
18. Masukan dan Pandangan Responden29
 - Pelayanan sudah sangat baik;
19. Masukan dan Pandangan Responden30
 - Besar harapan saya agar dalam mengurus perkara sudah tidak ada lagi korupsi /pungli;



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki **Indeks Persepsi Korupsi 98,17**. atau masuk pada kategori dengan mutu pelayanan **Sangat Baik** dan kinerja pelayanan **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 100;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 100;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 100;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 98;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 98;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 100;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 100;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 100;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 98;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 100;

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki **indeks di atas 95** atau masuk pada persepsi dengan mutu pelayanan **sangat baik** dan kinerja pelayanan **bebas dari korupsi**.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Transaksi Biaya** memiliki indeks paling rendah yakni **97,8** diantara indikator lainnya dan masih tergolong sangat baik.

Kepada seluruh jajaran manajemen dan seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pencari keadilan di semua ruang lingkup pelayanan yakni:

- a. Bahwa seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus lebih ramah dalam memberikan pelayanan,
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bagian harus disosialisasikan lagi,
- c. Bahwa seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



LAMPIRAN

ANALISA DATA
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
TAHUN 2020

NO. RESP	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN										JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	37
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
7	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
8	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
JUMLAH	136	136	136	132	133	136	135	136	134	136	1350
NNR PER RL	4	4	4	3.88	3.9	4	3.97	4	3.9	4	39.7
NNR TERTIMBANG	0.4	0.4	0.4	0.39	0.39	0.4	0.397	0.4	0.394	0.4	3.97



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

JL.KETINTANG MADYA VI NO. 2 SURABAYA
TELP./ FAX : (031) 8292138 – 8288622
KOTAK POS : 21 / SBS.IKIP– KODE POS : 60232
SURABAYA

Nomor Responden : (diisipetugas)

KUISIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i Pengguna Layanan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr./i terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menayakan pendapat pengguna layanan mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr./i.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr./i untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, Mei2019

Tim Survei



**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TAHUN 2019**

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : _____(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan : _____
3. Umur(Tahun) : _____
4. JenisKelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
5. Pendidikanterakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
6. PekerjaanUtama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
4. Wiraswasta 8. Lainnya _____

PETUNJUK :

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentinganilmiah.
- Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapatBapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei					
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksternal					
1.	Apakah pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan dan dipersulit untuk maksud tertentu ? (ManipulasiPeraturan)				
	1	2	3	4	



2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan oleh petugas dengan ada penawaran untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	1	2	3	4	
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi dengan ada biaya tambahan ? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Apakah ada pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)	1	2	3	4	
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan ? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	

Saran masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya:
